

Nasional

Soal Kampung Nelayan
Merah Putih, Menteri KP
'Disentil' Prabowo
Halaman 2

Bola dan Seleb

Liverpool Vs Man City,
2 Pilar Absen
Halaman 8

HARIAN MERDEKA

SABTU, 10 OKTOBER 2026

ASPIRASI RAKYAT

Rp. 15.000 | TERBIT SORE

Polemik Ijazah Gibran, Pengamat: Langkah Menghambat Politik Jokowi di 2029

JAKARTA | **Harian Merdeka** – Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyoroti dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Halaman 7

Menhan Sjafrie:

Batalyon Teritorial Pembangunan Perkuat Pertahanan Perbatasan



JAKARTA |
Harian Merdeka

Menteri
Pertahanan
(Menhan) Sjafrudin
Sjamsoeddin
menegaskan
keberadaan
Batalyon Infanteri
Teritorial
Pembangunan
(Yonif TP) me-
miliki peran
strategis dalam

memperkuat pertahanan wilayah Indonesia, terutama daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Hal tersebut disampaikan Sjafrudin melalui akun Instagram pribadinya @sjafrudin.sjamsoeddin saat mengunggah kunjungannya ke Yonif TP 926/Pangalangkong Libau di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (8/10/2026).

“Keberadaan Yonif TP 926/Pangalangkong Libau memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem pertahanan wilayah, khususnya di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” kata Sjafrudin dalam unggahannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu (10/10/2026).

Menurut Sjafrudin, penguatan pertahanan di wilayah perbatasan harus didukung prajurit yang berkualitas dan terlatih dalam bidang pertempuran. Selain itu, ketersediaan fasilitas serta peralatan yang memadai diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pertahanan.

Namun, tugas batalyon teritorial pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek militer. Satuan tersebut juga diharapkan berkontribusi dalam pembangunan wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“YTP juga bertugas mendukung pembangunan wilayah melalui kegiatan produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya. ● (hmi)

Soal Kampung Nelayan Merah Putih, Menteri KP ‘Disentil’ Prabowo



JAKARTA |
Harian Merdeka

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono hingga Wakil Menteri KP Didit Herdiawan Ashaf di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar). Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta laporan perkembangan pembangunan kampung nelayan merah putih (KNMP).

Pertemuan digelar di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Jumat (9/10/2026). Dalam pertemuan itu, turut hadir Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, Mendiktisaintek Brian Yulianto, hingga Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta update perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan yang tengah dipersiapkan pemerintah,” tulis Setkab di akun media

sosialnya.

“Hingga akhir tahun 2026, sebanyak 100 kampung nelayan ditargetkan siap beroperasi dengan berbagai fasilitas penunjang aktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan,” tambahnya.

Fasilitas yang dibangun di kampung nelayan antara lain:

- Dermaga sebagai infrastruktur pendukung aktivitas nelayan
- Pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan
- Fasilitas kulkas penyimpanan (cold storage)
- Pasar sebagai lokasi jual beli hasil tangkapan nelayan.

Pembangunan kampung nelayan disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pemerintah diketahui menargetkan pembangunan KNMP di 1.269 lokasi

sepanjang 2026. Hingga saat ini, pembangunan fisik telah dimulai di 1.090 lokasi, sementara 179 lokasi lainnya masih berada dalam tahap pra-pembangunan dan proses kontrak.

Data tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pembangunan dan Operasionalisasi KNMP serta Budidaya Ikan Darat Tematik di Jakarta, Selasa (15/9). Rakortas tersebut membahas percepatan pembangunan menuju target 5.000 KNMP hingga 2029.

Dari total lokasi yang sudah berjalan, 65 lokasi KNMP telah terbangun dan beroperasi. Sementara itu, pembangunan tahap kedua di 35 lokasi telah mencapai progres 85,6 persen per 2 September 2026.

Dari 35 lokasi tahap kedua tersebut, sembilan lokasi telah selesai 100 persen. Sisanya, 26 lokasi, ditargetkan rampung pada September 2026.

“Sekarang, di pemerintahan Presiden Prabowo, laut kita jadikan halaman depan. Karena itu, pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas, termasuk pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih sampai 2029,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9).

● (Egi)

Redaksi MERDEKA

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H. Mulyadi, Didit, Daenk, Ali R., Kabiho Medan : Umar, S.Pd. Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P. Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya, SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp: 081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Pasukan Berani Mati Jokowi Siap Keraahkan Jutaan Massa Bela Gibran Jika Dimakzulkan

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Koordinator Pasukan Berani Mati Jokowi, Sukodigdo Wardoyo, menyatakan siap mengerahkan jutaan massa untuk membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila muncul upaya pemakzulan yang dinilainya bertentangan dengan konstitusi.

Sukodigdo menegaskan, dinamika politik yang berkembang di tengah polemik mengenai posisi Gibran harus disikapi secara rasional dan tetap berpedoman pada konstitusi.

Menurut dia, pergantian atau pemberhentian pejabat negara tidak boleh hanya didasarkan pada tekanan kelompok politik, tuntutan sesaat, maupun perbedaan pilihan politik.

Ia mengingatkan bahwa Gibran memperoleh jabatan

wakil presiden melalui Pemilihan Presiden 2024. Karena itu, hasil pemilihan yang telah ditetapkan secara resmi harus dihormati, sedangkan setiap persoalan mengenai legitimasi, dugaan pelanggaran hukum, hingga pemberhentian pejabat negara harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.

"Kalau ada pihak yang ingin memakzulkan Gibran, harus jelas apa dasar konstitusionalnya. Jangan sampai perbedaan politik kemudian dijadikan alasan untuk menjatuhkan pejabat negara tanpa mengikuti prosedur hukum," kata Sukodigdo dalam pernyataannya kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).

Ia menilai, berkembangnya tuntutan agar Gibran dilengserkan perlu dicermati secara serius. Menurutnya, upaya pemberhentian wakil presiden tanpa dasar hukum dan



prosedur yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik.

Sukodigdo juga menegaskan bahwa demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Namun, kebebasan berpendapat harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap aturan konstitusional mengenai pergantian kekuasaan.

Dalam pandangannya, kritik terhadap Gibran merupakan bagian dari kebebasan demokrasi. Akan tetapi, kritik politik harus dibedakan dari proses pemakzulan yang memiliki persyaratan dan tahapan hukum tersendiri.

Pernyataan kesiapan mengerahkan jutaan massa tersebut menjadi sorotan di

tengah dinamika politik yang menyangkut posisi Gibran sebagai wakil presiden.

Meski demikian, wacana pemakzulan maupun pembelaan terhadap pejabat negara semestinya tetap ditempatkan dalam koridor konstitusi.

Setiap pihak memiliki hak menyampaikan pendapat, tetapi pelaksanaan hak tersebut harus tetap menghormati hukum dan menjaga ketertiban umum.

Sementara itu, pernyataan Sukodigdo mengenai kesiapan pengerahan jutaan massa merupakan klaim yang disampaikan pihaknya. Besaran massa yang akan dikerahkan dan bentuk aksi yang dimaksud belum dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan tersebut. ● (Egi)

Draf UU Pemilu Belum Rampung, LAPD Ingatkan Ancaman Ketidakpastian Hukum



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Direktur Eksekutif Lembaga Analisis dan Pemantauan Demokrasi (LAPD) Indonesia, Kaka Suminta, menyoroti proses revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang berjalan beriringan dengan persiapan seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2027-2032.

LAPD menilai, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian

serius karena Indonesia tengah mempersiapkan Pemilu 2029 dengan desain baru berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Dalam catatan kritis LAPD tertanggal 9 Oktober 2026, Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu memang telah dibentuk Komisi II DPR pada 29 September 2026.

Namun, Naskah Akademik dan draf RUU masih ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026 atau paling lambat awal Januari 2027.

Kaka Suminta menekankan pentingnya keterbukaan dokumen agar masyarakat dapat mengawasi proses legislasi secara bermakna, bukan sekadar dilibatkan dalam konsultasi formal.

Menurut analisis LAPD, partisipasi publik harus didukung akses terhadap dokumen, waktu

yang cukup untuk mengkaji substansi, kesempatan menyampaikan masukan, serta respons dari pembentuk undang-undang.

LAPD juga menyoroti belum ditemukannya pengumuman resmi pembentukan Tim Seleksi KPU dan Bawaslu periode 2027-2032 dalam sumber resmi yang tersedia hingga 9 Oktober 2026. Temuan tersebut, menurut dokumen LAPD, perlu terus diverifikasi karena masa jabatan penyelenggara Pemilu periode 2022-2027 berakhir pada April 2027.

Keterlambatan legislasi dan seleksi penyelenggara berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika aturan baru harus diterapkan menjelang Pemilu 2029.

Karena itu, LAPD mendesak DPR segera membuka Naskah Akademik, draf RUU, agenda dan

risalah rapat, serta matriks perubahan UU Pemilu. Pemerintah juga diminta memberikan kepastian mengenai pembentukan Timsel KPU dan Bawaslu serta menjamin proses seleksi yang independen dan berintegritas.

LAPD mengingatkan, pembentukan UU Pemilu menghadapi dua risiko sekaligus: pembahasan yang terlalu lambat dan pembahasan terburu-buru akibat tekanan waktu.

Bagi LAPD, revisi UU Pemilu dan seleksi KPU-Bawaslu harus dipandang sebagai satu rangkaian transisi demokrasi. Tujuannya bukan sekadar menghasilkan aturan baru tepat waktu, melainkan memastikan prosesnya transparan, partisipatif, dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Pemilu 2029. ● (Agus)

Kasus TPPU Febrie Adriansyah, LBH Desak APH Bongkar Jaringan 29 Entitas



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah membuka lapisan baru perkara yang kini bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pada Rabu (7/10/2026) mengungkap dugaan penggunaan 29 perusahaan dan yayasan yang disebut berkaitan dengan Febrie dan orang-orang kepercayaan sebagai sarana pencucian uang.

Menanggapi dakwaan tersebut, pengamat hukum dari LBH Peradi Profesional, Marulitua Rajagukguk, memberikan pandangan kritis. Menurutnya, pusaran kasus TPPU yang menyeret petinggi penegak hukum ini tidak boleh hanya berhenti pada pembuktian formal di persidangan, melainkan harus dibongkar hingga ke akar kepemilikan modal atau beneficial owner dari puluhan entitas yang diseret dalam pusaran perkara.

“Kasus ini adalah ujian telak bagi institusi peradilan kita. Ketika ada 29 entitas perusahaan dan yayasan yang terseret dalam pusaran TPPU seorang mantan pejabat penegak hukum tinggi, penegak hukum tidak boleh main-main atau tebang pilih. Bongkar siapa beneficial owner sebenarnya di balik layar,” ujar Marulitua saat dimintai tanggapannya di Jakarta, Sabtu (10/10/2026).

Marulitua menegaskan, modus operandi pencucian uang melalui jaringan korporasi cangkang (shell company) dan yayasan merupakan pola klasik kejahatan kerah putih (white collar crime) yang dirancang untuk menyamarkan asal-usul kejahatan. Oleh karena itu, ia mendesak agar penelusuran aliran dana menjangkau seluruh pemegang saham, pengurus, hingga sumber setoran modal.

“Penyidik dan majelis hakim harus berani masuk lebih dalam. Periksa secara forensik aliran transaksi antar korporasi tersebut, siapa yang menekan setoran modalnya, dan siapa penikmat akhir keuntungan dari aset-aset itu. Jangan sampai korporasi-korporasi ini hanya dijadikan ‘kuda troya’ untuk mencuci uang hasil kejahatan jabatan,” tegasnya. ● (Egi)

Korupsi Motor Listrik MBG Rp863 M, Kejagung Pelimpahan Tahap II 5 Tersangka

JAKARTA |
Harian Merdeka

Kerugian negara dalam proyek pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025–2026 mencapai Rp 863,8 miliar atau sekitar 72 persen dari total anggaran Rp 1,2 triliun.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap, ribuan unit motor listrik yang diadakan tidak dilengkapi baterai, sementara seluruh kendaraan yang diserahkan tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

“Perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 863,8 miliar,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

Nilai kerugian negara tersebut berdasarkan laporan hasil audit Nomor PE.03.03/SR/S-791/D6/03/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.

Anang menjelaskan, proyek pengadaan tersebut mencakup 19.269 unit motor listrik, terdiri atas 13.155 unit jenis trail dan 6.114 unit jenis skuter/bebek.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.355 unit motor listrik jenis trail dan 230 unit jenis skuter/bebek diketahui tidak dilengkapi baterai.

Selain itu, seluruh motor listrik roda dua yang diserahkan dilaporkan tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas.

Akibatnya, kendaraan tersebut tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan maupun dimasukkan ke dalam in-



ventarisasi Barang Milik Negara (BMN), sehingga mangkrak.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan lima tersangka. Penyidik juga telah melimpahkan para tersangka beserta barang bukti ke tahap II kepada tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus).

“Tim penyidik konektivitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM Pidmil) melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada tim penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus),” kata Anang.

Kelima tersangka tersebut adalah Kolonel (Cpl) Budi Utomo (BU), selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Empat tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Andri Mulyono (AM), Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) dan PT ASE; GB, Direktur PT ASE dan PT AKI; AA, Direktur PT ASE; serta YY, Direktur PT YAT.

Pelaksanaan tahap II berlangsung di Gedung

Kartika Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (9/10/2026).

Atas perbuatannya, kelima tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 KUHP Nasional juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional.

Penuntut umum Kejari Jakpus tetap menahan para tersangka selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penuntutan.

Jaksa juga akan meneliti berkas perkara beserta barang bukti sebelum menyiapkan surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Setelahnya, mempersiapkan surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk proses persidangan,” sebut Anang.

Sebelumnya, Kejagung telah menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, mulai dari pesawat dan helikopter hingga uang tunai senilai puluhan miliar rupiah.

● (Egi)

86 Korban Iming-Iming Bonus Emas Laporkan PT Divine Gems ke Bareskrim Polri

JAKARTA |
Harian Merdeka

Sebanyak 86 orang melaporkan penge-
lola PT Divine Gems and
Jewellery ke Bareskrim
Polri atas dugaan pe-
nipuan dan penggelapan
dalam transaksi emas dan
perak. Total kerugian para
korban ditaksir mencapai
Rp25 miliar dan masih
berpotensi bertambah.

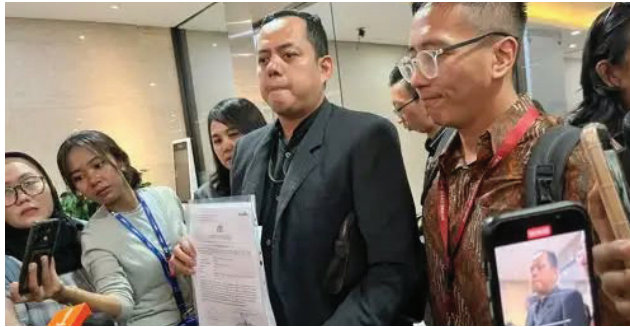
Laporan tersebut ter-
daftar dengan nomor
LP/B/476/X/2026/SPKT/
Bareskrim Polri tertang-
gal 8 Oktober 2026. Pihak
yang dilaporkan adalah
warga negara India berin-
isial JKR selaku direktur
utama perusahaan serta
komisaris berinisial ANB
dan pihak lainnya.

Kuasa hukum korban,
Bionda Johan Anggara,
mengatakan laporan itu
diajukan untuk meminta
kepolisian mengusut
dugaan penipuan yang
dilakukan melalui trans-
aksi jual beli emas dengan
sistem pre-order (PO).

"Kami datang ke
Bareskrim untuk melapor-
kan dalam dugaan tindak
pidana penipuan emas
dan penggelapan," kata
Bionda kepada wartawan
di gedung Bareskrim
Polri, Jakarta Selatan,
Jumat (9/10/2026).

Menurut Bionda, peru-
sahaan diduga menarik
minat konsumen melalui
penawaran pembelian
emas dengan bonus besar
serta skema pembelian
kembali atau buyback
dengan harga tinggi.

Salah satu penawaran
yang disebutkan kepada
korban adalah pembelian
emas lima gram den-
gan bonus empat gram.
Namun, sejumlah kon-
sumen mengaku telah
menyerahkan uang tanpa



menerima emas sesuai
waktu yang dijanjikan.

"Modusnya adalah
mereka melakukan jual
beli emas, ya, khusus
untuk pre-order di mana
dijanjikan dengan bonus
yang menarik, terus ter-
masuk beli 5 gram emas
mendapatkan bonus 4
gram emas. Tetapi dalam
jangka waktu yang dijan-
jikan, tidak ada emas itu.
Uangnya sudah diserah-
kan kepada perusahaan
tersebut," ujar Bionda.

Para korban menduga
penawaran tersebut mem-
buat konsumen terus
melakukan transaksi.
Hingga laporan diajukan,
kerugian yang dihimpun
diperkirakan mencapai
Rp25 miliar.

Bionda menyebut jum-
lah korban masih mung-
kin bertambah karena
pihaknya terus menerima
pengaduan dari orang-
orang yang mengaku men-
galami masalah serupa.

Salah satu korban,
Bernardus (38), mengaku
awalnya membeli perak
melalui sistem PO. Pada
transaksi pertama, barang
yang dipesan tiba setelah
sekitar satu bulan dan ter-
bukti memiliki kadar ses-
uai saat diuji di toko emas.

Pengalaman tersebut
membuatnya kembali
melakukan pembelian.
Menurut Bernardus, pen-
giriman kemudian mulai
tersendat sejak awal ta-

hun dan keterlambatan
semakin parah.

Ia juga mengungkap-
kan perusahaan sempat
gencar menawarkan dis-
kon besar pada Juli hingga
Agustus. Situasi tersebut
membuatnya kembali
melakukan transaksi, ter-
masuk ketika perusahaan
membuka gerai di Jakarta
sekitar Mei hingga Juni.

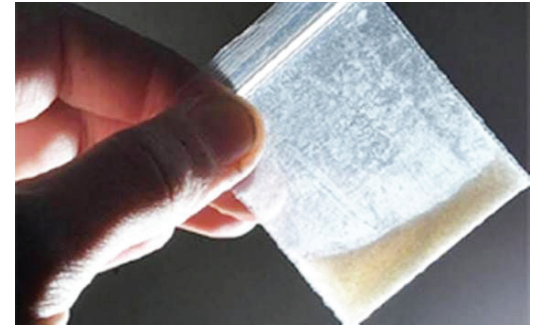
"Awal mulanya saya juga
takut karena ini sistemnya
PO. Di sini ada uang tapi
belum ada barang, gitu.
Jadi, saya beli jumlah se-
dikit dulu," kata Bernardus.
"Menunggu satu bulan,
beneran dikirim, lalu saya
otomatis juga tes keaslian-
nya. Saya bawa ke toko
emas, dites kadarnya, ka-
dar peraknya. Dan benar
itu asli. Jadi, ya, saya beli
terus. Ya, begitulah, jadi
umpannya itu asli," lan-
jutnya.

Bernardus memperki-
rakan nilai transaksi emas
dan perak yang belum te-
realisasi mencapai sekitar
Rp1 miliar.

"Saya hitungnya di
Rp1 M lah, sekitar Rp1 M
kalau dicampur emas dan
perak," ujarnya.

Para korban juga me-
nyoroti penutupan gerai
perusahaan di Jakarta,
Surabaya, dan Denpasar.
Mereka mengaku kesulitan
menghubungi pengurus
perusahaan setelah gerai-
gerai tersebut tutup.

● (Egi)



Petugas Rutan Depok Dipecat Usai Diduga Tiga Kali Masukkan Sabu

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan (Kemenimipras) menjatuh-
kan sanksi pemecatan terhadap seorang
petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan)
Depok berinisial SD. Petugas berstatus
aparatur sipil negara (ASN) itu diduga me-
masukkan narkoba jenis sabu ke dalam
rutan hingga tiga kali.

Inspektur Jenderal Kemenimipras Komjen
Rudi Setiawan mengatakan, pemecatan terse-
but merupakan tindak lanjut atas kasus dugaan
pesta sabu yang terjadi di Rutan Depok.

"Yang Depok itu kita pecat ya. Satu orang
kita berhentikan. Inisialnya SD," ujar Rudi
seusai rapat koordinasi di Kementerian
Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta,
Jumat (9/10/2026).

Menurut Rudi, SD diduga berulang kali
memasukkan sabu ke dalam rutin.

Sementara itu, petugas lain yang turut
terseret dalam kasus tersebut dijatuhi huku-
man disiplin. Namun, Rudi belum merinci
identitas petugas lainnya maupun bentuk
hukuman disiplin yang dijatuhkan.

"Petugasnya, petugas yang memasukkan
tiga kali narkoba ke dalam lapas, itu kita
berhentikan. Statusnya ASN, ya," katanya.

Polisi Telusuri Peran Petugas

Kasus dugaan pesta sabu di Rutan Depok
sebelumnya ditangani Polres Metro Depok.
Penyelidikan dimulai pada 27 September
2026 dan kasus tersebut menjadi sorotan
publik setelah viral pada 3 Oktober 2026.

Dalam proses penyelidikan, polisi meng-
geledah lokasi yang diduga digunakan untuk
pesta sabu serta memeriksa dua petugas rutin
yang diduga memiliki peran berbeda dalam
masuknya barang-barang ke lokasi tersebut.

Kapolres Metro Depok Kombes Christian
Rony Putra sebelumnya mengungkapkan,
satu petugas diduga menyediakan sabu,
sedangkan petugas lainnya diduga menye-
diakan lampu disko dan alat musik. "Yang
jelas sampai sekarang peranan mereka ber-
dua itu hanya satu menyediakan alat musik,
satu menyediakan sabu," ungkap Rony di
Balai Kota Depok, Senin (5/10/2026).

● (Egi)

Lapas Gunungsitoli Kerjasama dengan TASPEN

GUNUNGSITOLI |
Harian Merdeka

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunungsitoli menggandeng TASPEN Group untuk menyosialisasikan program kesejahteraan hari tua kepada pegawai. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Gunungsitoli itu bertujuan meningkatkan pemahaman pegawai mengenai pentingnya mempersiapkan masa pensiun sejak dini, Kamis (08/10/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Sahat Bangun, dan diikuti pejabat struktural, perwakilan TASPEN Group, staf terkait, serta peserta magang.

Sahat Bangun mengatakan, pemahaman mengenai program kesejahteraan hari tua merupakan bagian penting dari perencanaan masa depan pegawai, terutama ketika memasuki masa purnabakti.

"Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh pegawai mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai program

dan layanan TASPEN, sehingga dapat mempersiapkan masa pensiun secara matang dan terencana," demikian draf pernyataan Sahat Bangun yang perlu dikonfirmasi sebelum dipublikasikan.

Dalam kegiatan tersebut, TASPEN Group memaparkan sejumlah program dan layanan yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai, khususnya dalam menghadapi masa purnabakti. Pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi diskusi, tanya jawab, dan konsultasi.

Para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai program TASPEN serta memperoleh penjelasan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Menurut Sahat, perhatian terhadap kesejahteraan pegawai tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas selama masa kerja, tetapi juga mencakup kesiapan menghadapi kehidupan setelah pensiun.

"Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap pegawai semakin menyadari pentingnya



perencanaan kesejahteraan sejak dini. Kesiapan menghadapi masa pensiun diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya," pungkasnya.

Kegiatan berlangsung tertib dan kondusif. Para peserta mengikuti pemaparan materi serta berpartisipasi dalam diskusi untuk memperdalam pemahaman mengenai layanan yang disosialisasikan.

Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya Lapas Kelas IIB Gunungsitoli dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai perencanaan kesejahteraan hari tua, pegawai diharapkan mampu mempersiapkan masa purnabakti secara lebih terarah sekaligus tetap menjalankan tugas pelayanan pemasyarakatan secara profesional. ● (Egi)

Dampingi Wakil Panglima TNI, Gubernur Banten Resmikan Jalan 18 Km

PANDEGLANG |
Harian Merdeka

Gubernur Banten Andra Soni menyambut kedatangan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Jumat (9/10/2026). Kunjungan tersebut dalam rangka menghadiri Penutupan Karya Bakti TNI Skala Besar Tahun Anggaran 2026.

Usai prosesi penyambutan, Gubernur Andra Soni bersama Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dan rombongan langsung meninjau sejumlah gedung Koperasi Desa Merah Putih di wilayah setempat.

Adapun upacara penutupan Karya Bakti TNI Skala Besar ini digelar di Lapangan Yonif TP 842/Badak Sakti Rancecet, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu. Turut



hadir dalam acara tersebut Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani, Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Khatibul Umam, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Fikri Pebriansyah.

Diketahui, Program Karya

Bakti TNI Skala Besar 2026 ini berhasil membangun akses jalan baru sepanjang 18 km. Infrastruktur tersebut kini menghubungkan enam desa di Kecamatan Cimanggu.

Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita me-

nyampaikan, pelaksanaan Karya Bakti TNI ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan batalion teritorial pembangunan. Program ini bertujuan untuk membantu mengatasi persoalan infrastruktur yang menghambat aktivitas masyarakat di berbagai daerah.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil peninjauan sebelumnya, jalan sepanjang 18 km di Kabupaten Pandeglang tersebut mengalami kerusakan parah sehingga membatasi konektivitas warga. Oleh karena itu, program ini hadir untuk mendukung dan mengakselerasi program pemerintah daerah.

"Kami berharap akses jalan ini mampu mendorong kegiatan perekonomian masyarakat sekaligus mempermudah pelaksanaan program prioritas pemerintah ke depannya," ujar Jenderal Tandyo. ● (Egi)

Konflik IPSI Serang Ancam Nasib Atlet, Majelis Pakar PB IPSI Minta Pengprov Banten Bertindak

SERANG | **Harian Merdeka**

Majelis Pakar Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) periode 2026–2030, KH Abah Elang Mangkubumi, meminta Pengurus Provinsi (Pengprov) IPSI Banten tidak berdiam diri dan segera mengambil langkah rekonsiliasi (islah) atas konflik dualisme kepemimpinan IPSI Kabupaten Serang. Langkah ini dinilai mendesak demi menjaga keutuhan organisasi serta menyelamatkan pembinaan para atlet yang tengah bersiap menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten pada



November 2026 mendatang.

Abah Elang menyampaikan bahwa konflik internal di tubuh organisasi silat Kabupaten Serang sangat memprihatinkan. Menurut dia, silat mengajarkan kerendahan hati dan nilai-nilai kebersamaan, sehingga

perselisihan kepemimpinan yang terjadi saat ini tidak sepatutnya dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang bijak dari tingkat provinsi.

Dinamika dualisme ini berawal dari kekosongan kepemimpinan setelah ketua sebelumnya menyatakan mundur dan menganulir Surat Keputusan (SK) Tim Penjaringan pada 22 Juli 2026. Situasi tersebut memicu digelarnya dua Musyawarah Kabupaten (Muskab) berbeda hingga melahirkan dua klaim kepemimpinan. Persoalan ini bahkan sampai masuk ke meja DPRD Kabupaten Serang yang

menggelar audiensi bersama kedua belah pihak pada 18 Agustus 2026.

Dampak perselisihan tersebut dinilai kian meluas hingga ke tingkat akar rumput. Sejumlah Pengurus Kecamatan (Pengcam), seperti di Anyer dan Baros, dilaporkan diganti tanpa melalui prosedur organisasi yang sah seperti Musyawarah Kecamatan maupun Musyawarah Luar Biasa. Kondisi ini berpotensi merusak tata kelola organisasi dan menggerus kepercayaan para guru serta paguron setempat.

● (Egi)

MARKAS JUDOL

Analisis politik dan kebijakan publik Adib Miftahul melihat polemik tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan administrasi pendidikan, melainkan telah masuk ke dalam dinamika politik.

Adib menilai perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran berpotensi menjadi bagian dari tarik-menarik kepentingan politik menjelang kontestasi politik 2029.

Menurutnya, isu serupa yang sebelumnya muncul terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini kembali bergulir melalui persoalan dokumen pendidikan Gibran.

“Kalau saya melihat, ini bukan pure karena ingin mencari sebuah kebenaran, tetapi ini kan bridging politik. Ada beberapa pihak yang menikmati isu ini,” kata Adib kepada *Harian Merdeka*, Sabtu (10/10).

Menurut Adib, pihak yang berkepentingan terhadap bergulirnya isu tersebut dapat berasal dari berbagai kelompok. Ia menyebut, di antaranya pihak yang ingin mempertahankan posisi tawar politik Jokowi maupun kelompok yang ingin menghambat langkah politik Gibran ke 2029.

“Apakah itu Jokowi sendiri, apakah itu oposisi-oposisi yang enggak formal di luaran sana, atau memang ada orang yang ingin mendongkel posisi kuatnya, atau tawar-menawar

Jokowi yang sekarang punya anaknya Gibran ingin diambil alih,” ujarnya.

Ia menilai dinamika politik nasional tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perpindahan sejumlah figur dalam reshuffle tidak semata-mata menunjukkan hilangnya seluruh pengaruh politik dari kelompok yang selama ini diasosiasikan dengan pemerintahan Jokowi.

Dosen Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang itu juga menilai, sejumlah pejabat hanya mengalami perpindahan posisi, seperti Pratikno yang bergeser ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Staf Kepresidenan dan pejabat sebelumnya, yang memimpin KSP, bergeser ke posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.

Dalam susunan baru tersebut, Pratikno digantikan Sugiono sebagai Menko PMK, sedangkan Listyo Sigit Prabowo dipindahkan menjadi Kepala Staf Kepresidenan dan posisi Kapolri ditempati Suyudi Ario Seto. Ia berpandangan konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi masih menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam membaca dinamika kekuasaan saat ini.

“Ketika Pak Pratikno menjadi ketua Watimpres, anggotanya ada orang-orang yang berseberangan banyak dengan Pak Jokowi dulu, ini menandakan bahwa posisi tawar-menawar Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sangat tinggi,” tuturnya.

Posisi Gibran Masih Kuata di Tengah Dinamika

Terkait posisi Gibran, Adib menilai polemik mengenai dokumen pendidikan yang kini diperiksa MK tidak semata-mata mengubah posisi politik Gibran sebagai wakil presiden. Ia bahkan menyebut posisi Gibran masih kuat di tengah dinamika politik yang berkembang.

“Kalau ditanya secara efek politik, posisi Gibran aman. Saya malah meyakini 100 persen aman, enggak ada yang ngutak-ngatik,” katanya.

Ia menyebutkan, persoalan Certificate of Attendance dan ijazah perlu dilihat dari terminologi dokumen pendidikan yang digunakan di Indonesia dan luar negeri. Menurutnya, perbedaan istilah tersebut pada akhirnya menjadi ranah MK untuk menilai berdasarkan keterangan dan dokumen yang dihadirkan dalam persidangan.

“Apakah Gibran menghadirkan ijazah atau tidak, saya kira kan ini beda istilah di luar negeri dan kita. Ada ijazah, ada certificate, ada itu, ada ini, ya

mungkin biar MK yang melihat,” ujar dia.

Menurutnya, perdebatan dokumen pendidikan Gibran juga tidak dapat dilepaskan dari minimnya oposisi formal dalam politik nasional. Ia menyebut kelompok yang mengkritik pemerintah saat ini lebih banyak bergerak di luar struktur partai politik.

“Hari ini enggak ada oposisi kok. Oposisi yang menjalankan adalah orang yang tidak berpartai. Oposisi-oposisi informal kalau saya begitu,” ucap dia.

Adib melihat isu mengenai Gibran berpotensi terus menjadi bagian dari perdebatan politik hingga menjelang 2029. Ia menilai pertarungan kepentingan politik akan ikut menentukan bagaimana isu tersebut terus bergulir di ruang publik.

“Kalau posisi Gibran, sidang di MK ini hanya bunga-bunganya kehidupan bernegara saja sebetulnya,” bebernya.

Dalam sidang MK, Jumat, 2 Oktober 2026, anggota tim penilai dan verifikasi dokumen pendidikan Gibran di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Taufiq Damarjati, menyebut dokumen dari UTS Insearch yang diterima kementerian berupa Certificate of Attendance dan transkrip nilai. Keterangan tersebut disampaikan ketika hakim MK menggali proses penyetaraan pendidikan Gibran. ● (Egi)



Kirana Larasati Terseret Kasus Emas Rp 25 M

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kirana Larasati, buka suara mengenai laporan dugaan penipuan investasi emas yang telah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Dalam Instagram miliknya, Kirana meluruskan soal isu simpang siur yang beredar. Ia hanya terikat kontrak kerja profesional dalam durasi waktu yang sangat singkat, tanpa menyentuh ranah manajerial maupun pengelolaan dana para pembeli.

"Saya ingin menjelaskan keterlibatan saya dengan Nellava adalah dalam kapasitas profesional sebagai brand ambassador, dan kerja sama tersebut juga baru berjalan dalam waktu yang relatif singkat yakni dua bulan. Dalam kapasitas tersebut, saya tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan, pengelolaan dana customer, jual beli, transaksi, pengiriman barang, refund, dan lain-lain," jelas Kirana Larasati dilihat detikcom, Sabtu (10/10/2026).

Begitu mengetahui adanya gejala persoalan dan keluhan keterlambatan barang dari para konsumen, ia langsung menghentikan seluruh agenda promosi. Gak cuma itu, Kirana Larasati juga memutuskan ikatan kerja sama secara resmi lewat kuasa hukumnya. ● (dth)

LIVERPOOL VS MAN CITY, 2 PILAR ABSEN

LIVERPOOL |
Harian Merdeka

mendapat kabar buruk jelang duel kontra Manchester City. Dua pemain depan andalannya, Alexander Isak dan Cody Gakpo, absen karena cedera.

Isak dan Gakpo mendapat cedera saat memperkuat timnasnya masing-masing di ajang UEFA Nations League. Isak mengalami cedera paha, sementara Gakpo bermasalah dengan engkel.

Cedera kedua pemain itu rupanya tergolong berat sehingga harus melewatkan sesi latihan tim kemarin. Alhasil, manajer Andoni Iraola tidak mau memaksakan Isak dan Gakpo untuk main.

Itu artinya mereka akan absen saat Liverpool menjamu City di Anfield, Minggu (11/10/2026) malam WIB besok.

"Alex dan Cody tidak akan bermain. Mereka belum siap," ujar Iraola seperti dikutip The Athletic.

"Sebagai manajer, Anda selalu menunggu dan berharap tidak ada kabar buruk dari tim dokter. Kami tidak beruntun dengan Alex dan Cody," sambungnya.

"Cody cedera engkel. Dia sempat mengalami itu beberapa kali dalam kariernya dan itu

cuma persoalan bagaimana dia mengatasi rasra sakit. Dia mendapat tekel keras. Alex cedera otot ringan. Tidak ada satu pun yang akan absen lama."

Kehilangan keduanya tentu sangat merugikan mengingat Isak adalah top scorer tim dengan empat gol di seluruh ajang, sementara Gakpo memimpin daftar pencetak assist, yakni empat.

Jika keduanya absen, Liverpool bakal bertumpu pada Federico Chiesa atau Lewis Koumas di lini serang. Liverpool saat ini di posisi keenam klasemen Liga Inggris dengan sembilan poin dari enam laga. ● (dts)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN MERDEKA
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp50.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**